

**MEKANISME *DISMISSAL* BUPATI AKIBAT TINDAK PIDANA
KORUPSI DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG
PEMERINTAHAN DAERAH**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Program Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera
Utara

Oleh :

MUHAMMAD RIFWAL HAMDU

NPM: 71200111031

**ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA DAN ADMINISTRASI
NEGARA**



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : **MEKANISME DISMISSAL BUPATI DI INDONESIA
AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT
UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH**

NAMA MAHASISWA : **MUHAMMAD RIFWAL HAMDU**

NPM : **71200111031**

PROGRAM STUDI : **HUKUM**

Program Studi/Bagian : **HUKUM/HTN dan HAN**

Tanggal Ujian Skripsi :

Menyetujui

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Anggota Penguji

(Dr. Mukidi, SE., SH., M.H) (Dr. Ahmad Rusly Purba, S.IP., SH., MH) (Dr. Ibnu Affan, SH.M.Hum)

Ketua Prodi S 1 Hukum

Ketua Bagian HTN dan HAN

(Syarifuddin, SH.,MH)

(Dr. Ahmad Rusly Purba, S.IP., SH., MH)

Dekan

(Dr. Danialsyah, S.H.,M.H)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang dengan rahmat dan karunia-Nya telah memberikan kesehatan, kekuatan dan ketekunan pada penulis sehingga mampu dan berhasil menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari terdapatnya kekurangan, namun demikian dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Demi terwujudnya penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Danialsyah, S.H.,M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum UISU Medan.
2. Bapak Dr. Panca Sarjana Putra, SH.,M.H, sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Dakwah Islamiah Fakultas Hukum UISU Medan.
3. Bapak Syarifuddin, SH.,M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum UISU.
4. Bapak Dr. Ahmad Rusly Purba, S.IP., SH., MH, sebagai Ketua Bagian HTN dan HAN sekaligus Pembimbing II yang telah memberikan

masukan dan saran dalam pembuatan skripsi ini serta pengarahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Dr. Mukidi, SE., SH., M.H, sebagai Pembimbing I yang telah memberikan masukan dan saran dalam pembuatan skripsi ini.
6. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum UISU yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini dan juga tenaga kepegawaian yang telah membantu dalam administrasi perkuliahan.
7. Ayah dan Ibu yang dengan susah payah membesarkan, mendidik dan membiayai pendidikan penulis.
8. Teman-teman Kelas A yang selama ini telah memberikan momen perteman di bangku perkuliahan.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, hanya Allah SWT yang dapat membalas budi baik semuanya.

Medan, 27 Januari 2025
Penulis

Muhammad Rifwal Hamdu

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	8
BAB II Tinjauan Pustaka	11
A. Tinjauan Umum Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015	11
B. Tinjauan Umum Pemerintahan Daerah.....	19
C. Tinjauan Umum Pemberhentian Bupati	31
BAB III Metode Penelitian	47
A. Objek Penelitian.....	47
B. Sifat Penelitian	47
C. Metode Pendekatan.....	47
D. Teknik Pengumpulan Data	48
E. Analisis Data	49
BAB IV Hasil dan Pembahasan	50
A. Pengaturan Hukum Pemberhentian Bupati Dalam Sistem Pemerintahan Daerah	50
B. Mekanisme Hukum Pemberhentiaan Bupati Yang Telah Melakukan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang- undang Pemerintahan Daerah	58
C. Akibat Hukum Pemberhentian Bupati Menurut Sistem Pemerintahan Daerah	62
BAB V Kesimpulan dan Saran	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA.....	1
---------------------	---

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ni'Matul Huda, ***Hukum Tata Negara Indonesia***, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2013
- Titik Triwulan Tutik, ***Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUDNRI 1945***, Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Suryo Sakti Hardiwijoyo, ***Gubernur (Kedudukan Peran Dan Kewenangannya)***, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011
- Utang Rosidin, ***Otonomi Daerah Dan Desentralisasi***, Pusaka Setia, Bandung, 2015
- Agussalim Andi Gadjong, ***Pemerintahan daerah (Kajian Politik dan Hukum)***, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007
- Jajim Hamidi dan Mustafa Luthfi, ***Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia***, PT.Alumni, Bandung, 2010
- Pemerintahan Daerah (OTODA 2015)***, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2015
- C.S.T.Kansil, ***Sistem Pemerintahan Indonesia***, Bumi Aksara, Jakarta, 2005
- Logemann, ***Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif***, Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1975
- Utrecht.E, ***Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia***, Sinar Harapan, Jakarta, 1957
- Abdul Aziz Hakim, ***Impeachment Kepala Daerah***, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2018
- Dian Bakti Setiawan, ***PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH : Mekanisme Pemberhentian Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia***, Pt Rajagrafindo Persada, Depok, 2017
- Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, ***Pedoman Penulisan Skripsi***, Fakultas Hukum Uisu, Medan, 2018

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah

C. Jurnal

William Boyke Gosal et.al, **PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**, *Jurnal Lex Administratum* 9 (4), 2021

Zarida Hermanto dan Joko Suryanto, **Pilkada dan Sinergi Perencanaan Pembangunan antar Pemerintah daerah: Peran Gubernur yang Nyata tapi Tak Kentara**, *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah Volume VIII Edisi 2 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jawa Barat*, 2017

D. Internet

<https://metro.tempo.co/read/1860801/bekas-bupati-muna-rusman-emba-divonis-3-tahun-penjara-kasus-suap-dana-pen> diakses pada pukul 10:00 Wib Tanggal 10 Mei 2024

“Pengertian Pemberhentian”, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” melalui <http://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 11 Mei 2024

“Pengertian Bupati”, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” melalui <http://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 11 Mei 2024

“Pemerintahan Daerah”, “Wikipedia” melalui <https://id.wikipedia.org> diakses pada tanggal 12 Mei 2024.

Perpustakaan uns.ac.id digilibuns.ac.id.

M.Musri Nauli, “**Kekosongan Kekuasaan**”, <http://www.jambiekspres.co.id/index.php/opini/14463-kekosongan-kekuasaan.html> diakses pada tanggal 9 desember 2024 pukul 11.31 WIB.

Umbu Rauta, “**Pergantian Kepala Daerah Menurut Hukum Tata Negara**”, <http://beriman-hati.blogspot.co.id/2007/02/pergantian-kepala-daerah-menuruthukum.html> diakses pada tanggal 6 desember 2024 pukul 09.23 WIB.